

ABSTRAK

Tindak pidana pembuatan bahan peledak adalah tindak pidana yang sangat berbahaya yang dapat merugikan banyak orang, karena ulah individu yang membuat peledak dengan material dan takaran yang tidak sesuai dengan standar keamanan guna menjadi lahan penghasilan. Topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana bahan peledak di Indonesia dan proses pencarian alat bukti oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah .

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder serta data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan untuk teknis analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali informasi penting terkait penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa tindak pidana pembuatan bahan peledak belum memiliki peraturan tetap dan spesifik dan sampai sekarang acuan penyidik untuk menangani tindak pidana tersebut masih menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peran penyidik dalam mencari alat bukti didasarkan atas prosedur pembuktian didalam kitab undang-undang hukum acara pidana.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Bahan Peledak, Penyidik

ABSTRAK

The criminal act of manufacturing explosives is an extremely dangerous offense that can harm many people, often driven by individuals producing explosives with improper materials and dosages that do not meet safety standards for personal profit. This research discusses the legal framework regarding explosive-related crimes in Indonesia and the process of evidence collection by investigators of the Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimum) of the Central Java Regional Police.

The research adopts a normative juridical approach with an analytical descriptive specification. Both secondary and primary data were used, collected through literature study. The data were analyzed qualitatively by exploring key information related to the topic.

The findings reveal that the crime of manufacturing explosives still lacks specific and permanent regulations. To date, investigators rely on Emergency Law Number 12 of 1951 as the primary legal basis for handling such cases. Furthermore, the investigator's role in collecting evidence is based on the evidentiary procedures outlined in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: Evidence, Proof, Explosives, Investigator